



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : . 900/1513/415.44/2023
188/17/Pimp.DPRD/415.14/2023**
TANGGAL : 9 Agustus 2023

**TENTANG

RANCANGAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2023



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900/1513/415.44/2023
188/17/Pimp.DPRD/415.14/2023

TANGGAL : 9 Agustus 2023

**TENTANG
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. MUNDJIDAH WAHAB
Jabatan : Bupati Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- c. N a m a : FARID AL FARISI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- d. N a m a : ARIF SUTIKNO, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Jombang, 9 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG
Selaku
PIHAK PERTAMA**


Hj. MUNDJIDAH WAHAB

**Selaku
PIHAK KEDUA**


H. MAS'UD ZUREMI

KETUA


DONNY ANGGUN, S.Sos

WAKIL KETUA


FARID AL FARISI

WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tujuan 2

 1.3. Dasar Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 7

 2.1. Target Pendapatan Daerah 7

 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7

 2.1.2. Pendapatan Transfer 9

 2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah..... 9

 2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah 9

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 11

 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional..... 12

 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi. 32

 3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah..... 51

 3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja..... 74

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 75

 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 75

 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja 76

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 77

 5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan 77

 5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan 77

BAB VI PENUTUP..... 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024. 10

Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 13

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi 33

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah 52

Tabel 4. 1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... 75

Tabel 4.2 Plafon anggaran sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024 76

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait serta program, kegiatan serta sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan kebijakan politik pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2. Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan sementara batas maksimal anggaran yang akan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah. PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Jombang disusun dengan tujuan untuk :

1. Menentukan urutan prioritas program dan kegiatan, serta plafon anggaran sementara pada masing-masing urusan.
2. Memberikan pedoman teknis kepada SKPD dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
3. Memberikan batas sementara plafon maksimal anggaran kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor X Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor X);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84-4/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 85-5/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 115-8/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 6/C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 116-9/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 117-10/2020);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20222 Nomor 6/A);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 24/E);
32. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E);

33. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 80/E).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

2.1. Target Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan daerah yang direncanakan secara bruto pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.393.522.585.625,00. Rencana pendapatan daerah tersebut didasarkan atas realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi pendapatan daerah hingga semester I Tahun 2023, serta dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah pada P-APBD Tahun Anggaran 2023.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2024, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan semakin membaik baik secara nasional maupun di daerah sehingga berdampak akan adanya kenaikan pendapatan asli daerah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target PAD pada Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp.586.665.015.525,00 atau naik sebesar 9,74% dibandingkan dengan target penerimaan Tahun 2023. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan. Adapun rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dari target pendapatan Tahun 2023 yakni sebesar Rp 26.004.350.000,00

atau 17,59%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penerimaan pada semua jenis pajak daerah. Pajak Hotel naik sebesar Rp.750.000.000,00 (100%), Pajak Restoran naik sebesar Rp.3.000.000.000,00 (75%), Pajak Hiburan naik sebesar Rp.0,00 (0%), Pajak Reklame naik sebesar Rp.100.000.000,00 (5,88%), Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp.10.750.000.000,00 (16,48%), Pajak Parkir naik sebesar Rp.15.000.000,00 (25%), Pajak Air Tanah naik sebesar Rp.900.000.000,00 (56,25%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan naik sebesar Rp.0,00 (0%), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan naik sebesar Rp.5.489.350.000,00 atau sebesar 14,25% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diproyeksikan naik sebesar Rp.5.000.000.000,00 (14,29%).

b. Retribusi Daerah

Proyeksi Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.898.383.830,00 atau 4,61% dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2023. Prosentase kenaikan terbesar pada Retribusi Jasa Usaha dengan penyumbang terbesar kenaikan ada pada retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi Jasa umum mengalami penurunan sebesar 1,24% yang disebabkan oleh penurunan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pengendalian menara. Sedangkan retribusi perijinan tertentu mengalami kenaikan sebesar 5,02% yang disebabkan oleh pengalokasian retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.8.206.626.422,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.988.362.021,00 atau 57,27% bila dibandingkan dengan target penerimaan Tahun 2023 yang disebabkan oleh kenaikan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebesar Rp.152.505.542,00 dan kenaikan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.2.835.856.479,00.

d. Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.384.230.639.000,00 mengalami kenaikan

sebesar Rp.22.187.047.230,00 atau 6,13% dibandingkan dengan tahun 2023 yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan denda pajak daerah dan kenaikan pendapatan BLUD .

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer tahun anggaran 2024 diproyeksikan menurun jika dibandingkan dengan alokasi pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 diprediksikan sebesar Rp.1.806.857.570.100,33,00 atau menurun sebesar 18,21%. Faktor utama yang menyebabkan proyeksi Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 menurun adalah karena belum mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Non Fisik maupun DID. Belum dicantumkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 maupun DID disebabkan belum diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 atau bahkan informasi resmi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Republik Indonesia.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan belum dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024.

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah didasarkan atas proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan yang mendasarinya. Besaran proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.238.736.043.216,00 rincian dari penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari perkiraan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.158.736.043.216,00 proyeksi penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00 dan pencairan dana cadangan yang direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Sebagaimana asumsi atas kondisi perekonomian serta berbagai kebijakan pada pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang tertuang dalam dokumen

KUA Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024, rincian penerimaan daerah dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 tersaji dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

KOD E	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	586.665.015.525	
4.1.01	Pajak daerah	173.827.000.000	Perda No 1 Tahun 2020
4.1.02	Retribusi daerah	20.400.750.103	Perda No 2 Tahun 2020 Perda No 5 Tahun 2020 Perda No 6 Tahun 2020
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.206.626.422	Proyeksi
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	384.230.639.000	Proyeksi
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.806.857.570.100	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.608.974.196.830	Proyeksi didasarkan atas Permendagri 84 Tahun 2022
4.2.02	Transfer Antar Daerah	197.883.373.271	Proyeksi didasarkan atas Permendagri 84 Tahun 2022
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	
4.3.01	Hibah	-	
4.3.02	Dana Darurat		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.393.522.585.625	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.736.043.216	
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	158.736.043.216	Proyeksi
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000	Perda no 9 Tahun 2020
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	20.000.000.000	Proyeksi
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
6.1.06	Penerimaan piutang daerah		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.736.043.216	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.632.258.628.841	

Sumber : BPKAD Tahun 2023

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal harus dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah berisi program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran tahunan Pembangunan Daerah serta penyelesaian permasalahan Pembangunan Daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan pendanaan yang terbatas di daerah. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas Pembangunan Daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Perencanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, juga memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019–2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Disamping itu juga sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur yaitu untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, meningkatkan inovasi dan penggunaan kemajuan teknologi informasi secara tepat, dan mengedepankan kerjasama lintas teknis, lintas sektor bahkan lintas kewilayahan agar dapat mewujudkan pembangunan yang sinergis lintas sektor, bertahap, dan berkelanjutan.

Mendasar pada tema dan prioritas nasional, tema dan prioritas RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam dokumen RPD maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah: **“Pembangunan infrastruktur berkelanjutan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis dan SDM unggul”** yang ditetapkan dalam 3 (tiga) prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketenteraman umum.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

- 3. Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah.

Selanjutnya untuk Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.2; Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3; dan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.4.

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dirangkum ke dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	Prioritas V: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Prioritas VII: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Seluruh OPD	
2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah Skor penyerapan anggaran Skor Opini BPK atas LKPD	BPKAD	
3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu Peningkatan capaian pemanfaatan aset Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	BPKAD	
4		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	Inspektorat	
5		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Inspektorat	
6		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Bapenda	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
7		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Bappeda	
8		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Bappeda	
9		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Bappeda	
10		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan	
11		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif Persentase rata-rata capaian kinerja kelurahan	Kecamatan	
12		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kecamatan	
13		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Kecamatan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
14		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sekretariat DPRD	
15		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang Menjamin Keselamatan Arsip	Dinas Perpustakaan & Arsip	
16		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang dilakukan pengawasan kearsipan	Dinas Perpustakaan & Arsip	
17		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Perekaman KTP el Persentase Cakupan kepemilikan KIA Persentase Cakupan kepemilikan KTP el	Dinas Kependudukan & Capil	
18		Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan kepemilikan Akta Kelahira	Dinas Kependudukan & Capil	
19		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dinas Kependudukan & Capil	
20		Program Pemerintahan dan	1. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - Undangan	Sekretariat	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Kesejahteraan Rakyat	2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi kebijakan bidang Kesra 3. Jumlah kebijakan bidang Kesra 4. Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan 5. jumlah Monitoring dan Evaluasi kebijakan bidang Pemerintahan 6. Persentase produk hukum yang sesuai kaidah hukum	Daerah	
21		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	Sekretariat Daerah	
22		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna sistem informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	DPMPTSP	
23		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	DPMPTSP	
24		Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	BKPSDM	
25		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
26		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Diskominfo	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
27		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Diskominfo	
28		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Diskominfo	
29		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Diskominfo	
30		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda/perkada	Satpol PP	
31		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Prosentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila	Bakesbangpol	
32		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi	Bakesbangpol	
33		Program Pemberdayaan	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Bakesbangpol	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
34		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	Bakesbangpol	
35		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Bakesbangpol	
36		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
37		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
38		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis cagar budaya yang dipelihara pemerintah daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
39		Program Koordinasi Ketentraman Dan	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Ketertiban Umum			
40		Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai raport pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
41	Prioritas IV: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standart	Dinas Sosial	
42		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
43		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Arsip	
44		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastas daya saingnya	Disporapar	
45		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang berkembang	Disporapar	
46		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
47		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	
48		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	Dinas Kesehatan	
49		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC) Nilai Akreditasi RS Persentase capaian SPM rumah sakit	Dinas Kesehatan RSUD Jombang RSUD Ploso	
50		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	Disporapar	
51		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
52		Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
53		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan	Persentase ARG		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Perempuan		Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
54		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani secara komprehensif		
55		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak		
56		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani		
57		Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesos Tersertifikasi 2. Persentase LKS yang terakreditasi	Dinas Sosial	
58		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Berhasil Direhabilitasi	Dinas Sosial	
59		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	Dinas Sosial	
60		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	Dinas Sosial	
61	Prioritas I: Memperkuat Ketahanan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif	Dinas Pengendalian	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
62	Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Prioritas II: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas III: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas VI: Membangun lingkungan hidup,	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Penduduk KB & PPPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
63		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil		
64		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi		
65		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar		
66		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi		
67		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri		
68		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas		
69		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
70	meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian	
71		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jalan Usaha Tani/JUT)		
72		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Dinas Pernakan	
73		Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat 2. Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas	Dinas Pertanian dan Dinas Pernakan	
74		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Olah Tanah) Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai	Dinas Pertanian dan Dinas Pernakan	
75		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha	Dinas Pernakan	
76		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	Dinas Pernakan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Kesehatan Masyarakat Veteriner			
77		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
78		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi)	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
79		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel uji yang aman	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
80		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
81		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
82		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
83		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
84		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	Dinas Koperasi & UM	
85		Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	Dinas Koperasi & UM DPMPTSP	
86		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen potensi dan peluang investasi yang dimanfaatkan		
87		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal		
88		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	Disporapar Disporapar	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
89		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	Disporapar	
90		Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan		
91		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	DPMD	
92		Program Penataan Desa	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa		
93		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif		
94		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. IKM Desa 2. IPP Desa 3. Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. 4. Prosentase peningkatan status B UMDes/BUMDesma		
95		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif	Dinas PUPR	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
96		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Dinas PUPR	
97		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi		
98		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis		
99		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik		
100		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	Dinas PUPR	
101		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan		
102		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti		
103		Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	Dinas	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
104		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	
105		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Perlindungan Sebidang Kereta Api yang sesuai kriteria keselamatan yang optimal	Dinas Perumahan dan Permukiman	
106		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
107		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	
108		Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	Dinas Perumahan dan Permukiman	
109		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
110		Program Peningkatan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	Dinas	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Perumahan dan Permukiman	
111		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
112		Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	
113		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	
114		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan pengelolaan persampahan		
115		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	
116		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
117		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
118		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
119		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	Dinas Lingkungan Hidup	
120		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BPBD	
121		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
122		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dan instruktur yang lulus uji kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	
123		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	
124		Program Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja	
125		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	Dinas Koperasi & UM	
126		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	Dinas Koperasi & UM	
127		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	Dinas Koperasi & UM	
128		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Koperasi & UM	

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dirinci ke dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	Prioritas V: Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Prioritas VII: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Seluruh OPD	
2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah Skor penyerapan anggaran Skor Opini BPK atas LKPD	BPKAD	
3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu Peningkatan capaian pemanfaatan aset Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	BPKAD	
4		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	Inspektorat	
5		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Inspektorat	
6		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Bapenda	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
7		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Bappeda	
8		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Bappeda	
9		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Bappeda	
10		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan	
11		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif Persentase rata-rata capaian kinerja kelurahan	Kecamatan	
12		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kecamatan	
13		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Kecamatan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
14		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sekretariat DPRD	
15		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang Menjamin Keselamatan Arsip	Dinas Perpustakaan & Arsip	
16		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang dilakukan pengawasan kearsipan	Dinas Perpustakaan & Arsip	
17		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Perekaman KTP el Persentase Cakupan kepemilikan KIA Persentase Cakupan kepemilikan KTP el	Dinas Kependudukan & Capil	
18		Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan & Capil	
19		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dinas Kependudukan & Capil	
20		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - Undangan 2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi kebijakan bidang Kesra	Sekretariat Daerah	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
			3. Jumlah kebijakan bidang Kesra 4. Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan 5. jumlah Monitoring dan Evaluasi kebijakan bidang Pemerintahan 6. Persentase produk hukum yang sesuai kaidah hukum		
21		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	Sekretariat Daerah	
22		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna sistem informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	DPMPTSP	
23		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	DPMPTSP	
24		Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	BKPSDM	
25		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	
26		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Diskominfo	
27		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Diskominfo	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
28		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Diskominfo	
29		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Diskominfo	
30		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda/perkada	Satpol PP	
31		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Prosentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila	Bakesbangpol	
32		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi	Bakesbangpol	
33		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Bakesbangpol	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
34		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	Bakesbangpol	
35		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Bakesbangpol	
36		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
37		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
38		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis cagar budaya yang dipelihara pemerintah daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
39		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan	
40		Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai raport pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
41		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standart	Dinas Sosial	
42	Prioritas IV: Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
43		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Arsip	
44		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastas daya saingnya	Disporapar	
45		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang berkembang	Disporapar	
46		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	
47		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	
48		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	Dinas Kesehatan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
49		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC) Nilai Akreditasi RS Persentase capaian SPM rumah sakit	Dinas Kesehatan RSUD Jombang RSUD Ploso	
50		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	Disporapar	
51		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
52		Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
53		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
54		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani secara komprehensif		
55		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
56		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani		
57		Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesos Tersertifikasi 2. Persentase LKS yang terakreditasi		
58		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Berhasil Direhabilitasi	Dinas Sosial	
59		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	Dinas Sosial	
60		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	Dinas Sosial	
61		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	
62	Prioritas I: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
63		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
64	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata. Prioritas II: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Prioritas III: Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi Prioritas VI:	Program Pengembangan Ekspor	Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi		
65		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar		
66		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi		
67		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri		
68		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas		
69		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah		
70		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan		
71		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jalan Usaha Tani/JUT)	Dinas Pertanian	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
72	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
73		Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat 2. Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
74		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Olah Tanah) Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai		
75		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha		
76		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	Dinas Peternakan	
77		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
78		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi)	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
79		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel uji yang aman	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
80		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
81		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
82		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
83		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
84		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	Dinas Koperasi & UM	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
85		Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	Dinas Koperasi & UM	
86		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase dokumen potensi dan peluang investasi yang dimanfaatkan	DPMPTSP	
87		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal		
88		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal		
89		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	Disporapar	
90		Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan		
91		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
92		Program Penataan Desa	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa	DPMD	
93		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif		
94		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. IKM Desa 2. IPP Desa 3. Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDDes dan APBDes. 4. Prosentase peningkatan status B UMDes/BUMDesma		
95		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif		
96		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Dinas PUPR	
97		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi		
98		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis		
99		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
100		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina		
101		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan		
102		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti		
103		Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi		
104		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	
105		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Presentase Fasilitas Perlintasan Sebidang Kereta Api yang sesuai kriteria keselamatan yang optimal		
106		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
107		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terteabilitas	Dinas Perumahan dan Permukiman	
108		Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	Dinas Perumahan dan Permukiman	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
109		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
110		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	
111		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	
112		Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	
113		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	
114		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
115		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	
116		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		(Kehati)			
117		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
118		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
119		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	Dinas Lingkungan Hidup	
120		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BPBD	
121		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD	
122		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dan instruktur yang lulus uji kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
123		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	
124		Program Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja	
125		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	Dinas Koperasi & UM	
126		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	Dinas Koperasi & UM	
127		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	Dinas Koperasi & UM	
128		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Koperasi & UM	

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Berdasarkan tema pembangunan, prioritas pembangunan, dan sasaran pembangunan, maka prioritas pembangunan Kabupaten Jombang berdasarkan prioritas daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Prioritas I : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan dan Ketentraman Umum	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Seluruh OPD	1.029.085.003.567,00	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah Skor penyerapan anggaran Skor Opini BPK atas LKPD	BPKAD	529.635.856.873,00	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu Peningkatan capaian pemanfaatan aset Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	BPKAD	2.612.451.700,00	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	Inspektorat	2.828.618.474,00	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	Inspektorat	658.183.593,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Bapenda	7.363.009.200,00	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Bappeda	1.243.907.350,00	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Bappeda	1.646.802.300,00	
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Bappeda	897.930.200,00	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan	174.519.500,00	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif Persentase rata-rata capaian kinerja kelurahan	Kecamatan	4.906.621.178,00	
			Program Penyelenggaraan	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Kecamatan	1.507.419.900,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Kecamatan	259.061.900,00	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sekretariat DPRD	27.873.930.799,00	
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang Menjamin Keselamatan Arsip	Dinas Perpustakaan & Arsip	22.741.000,00	
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang dilakukan pengawasan kearsipan	Dinas Perpustakaan & Arsip	327.344.475,00	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Perekaman KTP el Persentase Cakupan kepemilikan KIA Persentase Cakupan kepemilikan KTP el	Dinas Kependudukan & Capil	117.302.250,00	
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan kepemilikan Akta Kelahira	Dinas Kependudukan & Capil	89.127.850,00	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun Persentase pelayanan administrasi	Dinas Kependudukan & Capil	192.535.500,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
				kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi Persentase Wajib KTP yang sudah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)			
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - Undangan 2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi kebijakan bidang Kesra 3. Jumlah kebijakan bidang Kesra 4. Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan 5. jumlah Monitoring dan Evaluasi kebijakan bidang Pemerintahan 6. Persentase produk hukung yang sesuai kaidah hukum	Sekretariat Daerah	29.967.359.500,00	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi Jumlah pengambilan keputusan program pembangunan	Sekretariat Daerah	1.967.923.846,00	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna sistem informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	DPMPTSP	372.690.000,00	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	DPMPTSP	320.414.150,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	BKPSDM	2.903.627.630,00	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	2.209.452.300,00	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Diskominfo	1.789.717.600,00	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Diskominfo	5.564.641.999,00	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Diskominfo	217.329.600,00	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase data Sektor yang dipublikasikan	Diskominfo	386.718.500,00	
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persentase penduduk yang memperoleh	Satpol PP	10.803.084.319,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
				layanan akibat dari penegakan perda/perkada			
		Sasaran 4: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Prosentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila	Bakesbangpol	1.034.639.050,00	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi	Bakesbangpol	59.525.105.590,00	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Bakesbangpol	7.757.449.100,00	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	Bakesbangpol	337.062.450,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Bakesbangpol	926.275.618,00	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	877.506.500,00	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.342.146.000,00	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis cagar budaya yang dipelihara pemerintah daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	404.320.200,00	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan	315.387.400,00	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai raport pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91.137.495.417,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standart	Dinas Sosial	114.904.000,00	
2	Prioritas II : Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Untuk Membangun SDM Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Inovatif Serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.081.831.350,00	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Arsip	526.847.186,00	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastast daya saingnya	Disporapar	898.240.620,00	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang berkembang	Disporapar	800.000.000,00	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan di Fasyankes Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	150.341.000,00	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	Persentase Penyedia Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Memenuhi Standar	Dinas Kesehatan	135.502.100,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Makanan Minuman				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	Dinas Kesehatan	315.271.475,00	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC) Nilai Akreditasi RS Persentase capaian SPM rumah sakit	Dinas Kesehatan RSUD Jombang RSUD Ploso	499.444.185.983,00	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	Disporapar	5.378.674.850,00	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	730.413.700,00	
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	79.355.200,00	
			Program	Persentase ARG	Dinas	733.084.550,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Pengendalian Penduduk KB & PPPA		
		Sasaran 3: Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani secara komprehensif		231.983.850,00	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak		186.132.100,00	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani		294.371.500,00	
			Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesos Tersertifikasi 2. Persentase LKS yang terakreditasi		1.336.912.956,00	
		Sasaran 11: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi bagi Penduduk Miskin dan Rentan.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Berhasil Direhabilitasi	Dinas Sosial	1.746.307.890,00	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid	Dinas Sosial	13.878.662.223,00	
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	Dinas Sosial	628.605.800,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA	453.898.850,00	
3	Prioritas III : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah	Sasaran 5: Meningkatnya PDRB unggulan dan Investasi Daerah.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.546.000.172,00	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil		2.082.398.750,00	
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi		612.982.400,00	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar		209.999.900,00	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi		111.199.900,00	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri		2.011.265.000,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas		30.000.000,00	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah		14.000.000,00	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan		11.072.500,00	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jalan Usaha Tani/JUT)	Dinas Pertanian	10.064.412.136,00	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		631.405.650,00	
			Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat 2. Persentase Poktan yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluh yang Naik Kelas	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	3.800.142.143,00	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Memadai (Sarana Olah Tanah) Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai		19.202.217.556,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha		133.055.790,00	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	Dinas Petrernakan	408.274.962,00	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	225.228.200,00	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG (Energi)	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	1.018.061.150,00	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel uji yang aman	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	79.000.000,00	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	581.091.400,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	601.568.933,00	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	63.020.700,00	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	173.838.200,00	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	Dinas Koperasi & UM	185.612.600,00	
			Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	Dinas Koperasi & UM	264.730.500,00	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase dokumen potensi dan peluang investasi yang dimanfaatkan	DPMPTSP	277.392.000,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal		1.219.850.400,00	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal		148.769.940,00	
		Sasaran 6: Meningkatnya Kunjungan Wisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	Disporapar	4.419.717.236,00	
			Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan		769.935.756,00	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi		471.667.100,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
		Sasaran 7: Meningkatnya Keberdayaan Desa,	Program Penataan Desa	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa	DPMD	57.040.000,00	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif		177.287.750,00	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. IKM Desa 2. IPP Desa 3. Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. 4. Prosentase peningkatan status BUMDes/BUMDesma		2.701.443.800,00	
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif		36.000.000,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
		Sasaran 8: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan antar wilayah.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Dinas PUPR	25.581.501.325,00	
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi		8.868.863.916,00	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis		99.963.270,00	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik		92.934.282.677,00	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina		474.826.574,00	
			Program Penyelenggaraan	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan		2.129.515.800,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Penataan Ruang				
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti		59.108.100,00	
			Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi		104.525.000,00	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	13.868.170.832,00	
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Presentase Fasilitas Perlintasan Sebidang Kereta Api yang sesuai kriteria keselamatan yang optimal		871.447.200,00	
		Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.525.000.000,00	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.200.000.000,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	Dinas Perumahan dan Permukiman	11.756.042.582,00	
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.995.999.750,00	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	990.966.750,00	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.500.000.000,00	
			Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	Dinas Perumahan dan Permukiman	500.651.500,00	
			Program Pengembangan Sistem	Persentase infrastruktur persampahan yang sesuai standar	Dinas Lingkungan	1.800.000.000,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Dan Pengelolaan Persampahan Regional		Hidup		
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	12.309.647.070,00	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	2.209.856.871,00	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	5.394.106.140,00	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	334.368.600,00	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	Persentase lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	549.090.900,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
			Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase laporan penanganan pengaduan yang diterbitkan.	Dinas Lingkungan Hidup	91.170.000,00	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BPBD	774.647.969,00	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD	430.781.650,00	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dan instruktur yang lulus uji kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	710.949.482,00	
		Sasaran 10: Meningkatnya Partisipasi Angkatan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	603.518.149,00	
			Program Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja	1.686.702.649,00	

No	PRIORITAS PEMBANGUN AN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETER ANGAN
		Kerja.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	Dinas Koperasi & UM	446.196.000,00	
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	Dinas Koperasi & UM	32.940.800,00	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Kompeten	Dinas Koperasi & UM	153.804.000,00	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Koperasi & UM	182.059.200,00	

3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Di bawah ini tabel 3.4 disampaikan program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dimana dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun selain itu juga harus disinkronkan dengan rencana Kerja Pemerintah Provinsi.

Untuk lebih memahami plafon anggaran maka akan lebih mudah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan daerah, maka plafon anggaran sementara untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dirinci dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Plafon anggaran sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	1.856.084.913.663
5:01:01	Belanja Pegawai	910.529.143.530
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	776.433.329.268
5:01:04	Belanja Subsidi	
5:01:05	Belanja Hibah	152.122.590.865
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	16.999.850.000
5.2	BELANJA MODAL	229.205.567.155
5:02:01	Belanja Modal Tanah	4.831.531.335
5:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.616.698.515
5:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.224.842.853
5:02:04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.997.764.452
5:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.730.000
5:02:06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.500.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.768.982.816
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.768.982.816
5.4	BELANJA TRANSFER	518.199.165.207
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.178.555.324
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	498.020.609.883
JUMLAH BELANJA		2.612.258.628.841

Sumber : BPKAD Kab. Jombang Tahun 2023

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pada Tahun 2024 komponen penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.158.736.043.216,00 Penerimaan dana cadangan sebesar Rp.60.000.000.000,00 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Komponen pengeluaran pembiayaan daerah meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal daerah, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo. Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo sebesar Rp.20.000.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp.218.736.043.216,00. Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	238.736.043.216
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	158.736.043.216
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	20.000.000.000
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
6.1.06	Penerimaan piutang daerah	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		238.736.043.216
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000
6:02:01	Pembentukan Dana Cadangan	
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah	
6:02:03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		20.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		218.736.043.216

Sumber : BPKAD Kab. Jombang Tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Jombang, 9 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG
Selaku
PIHAK PERTAMA


HJ. MUNDJIDAH WAHAB

Selaku
PIHAK KEDUA


H. MAS'UD ZUREMI
KETUA

DONNY ANGGUN, S.Sos

WAKIL KETUA


FARID AL FARISI

WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP

WAKIL KETUA